



RINGKASAN BERTA HARI INI

Flyover Gedangan Mulai Digarap 2027

Pembebasan Lahan Ditarget Rampung Akhir 2026

Sidoarjo, Memorandum

Pemblik Sidoarjo menyosialisasikan rencana pengadanan tanah pembangunan Flyover Gedangan yang dilandasi ratusan warga terdampak di Kantor Kecamatan Gedangan.

Dalam agenda tersebut, Pemblik Sidoarjo menerangkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026. Sementara pembangunan Flyover dilaksanakan mulai Desember 2027.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah Kepala Dinas PUMSDA, Kepala Dinas Perkim CTK, Camat, serta Kepala Desa. Untuk hasil perolehan BPN, Kejaksaan



Sosialisasi pengadanan tanah Flyover Gedangan dihadiri ratusan warga terdampak proyek pembangunan.

Kepala Dinas PUMSDA Kabupaten Sidoarjo, M. Mahidul, mengatakan bahwa pengadanan tanah yang meliputi pembebasan, persiapan, hingga pelaksanaan.

Menurutnya, tahapan pelaksanaan mencakup pengadanan lahan, inventarisasi data fisik, dan yuridis, penilaian oleh appraisal independen, hingga pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Pembangunan Flyover Gedangan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintasi Gedangan. Selain itu, proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan yang melintasi Gedangan.

Pemblikas, PDM, dan lahan milik PT KAL.

Sementara itu, Subandi menjelaskan bahwa lahan tidak akan dibebani pajak maupun PBB/D dalam proses pembebasan lahan.

Di samping itu, masyarakat yang terdampak akan mendapat kompensasi berupa ganti rugi dan biaya pembangunan, hingga tanam yang berada di atas tanah tersebut. Warga juga diminta untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat agar proses administrasi berjalan lancar.

Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi, proyek Flyover Gedangan diharapkan menjadi salah satu pencapaian penting dalam pembangunan kawasan tersebut. (Jok/Ser)



JUWA SOSIAL: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua dari kiri) saat menggondong balita di UPT PPSAB Sidoarjo, Selasa (19/5) sore.



DUK SANGIRPAMBO RIBOALO

Marfen Dapat Apresiasi dari Wabup Mimik Idayana

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana menguji coba Marfen, siswa kelas V MI Darussalam Sugiwaras Kecamatan Candi, Senin (18/5). Marfen kini menjadi perhatian publik setelah surutnya dibaca langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Surat yang dituliskan Marfen ini



Wabup Mimik Idayana mengunjungi Marfen, siswa kelas V MI Darussalam Sugiwaras Kecamatan Candi, Senin (18/5).

berisi ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirasakannya langsung di sekolahnya. Surat tersebut diterima Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5) lalu.

Kunjungan Wabup Mimik Idayana ke lokasi apresiasi atas perhatian dan kepedulian seorang anak

terinspirasi apriasi langsung ke Presiden RI. Kisah Marfen juga menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya karena berpedal semangat dan positif.

Kata Wabup Mimik Idayana, Marfen patut diapresiasi karena mampu menunjukkan sikap percaya diri sekaligus kepedulian terhadap program pemerintah. "Tentu kami bangga

Omah Terapi-Ku di UPT PPSAB Resmi Dibuka untuk ABK dan PMKS

Warga Kurang Mampu Bisa Terapi Gratis

KOTA-Harapan baru bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hingga masyarakat kurang mampu kini hadir di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka layanan Omah Terapi-Ku di Jalan Monginsidi, Kelurahan Sidoklumpuk, yang menyediakan terapi gratis bagi warga kurang mampu setiap hari Rabu.

Layanan yang direvisikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menjadi salah satu

upaya memperluas akses terapi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendampingan tumbuh kembang maupun rehabilitasi.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur (Kadinsos Jatim) Restu Novi Widiana mengatakan, Omah Terapi-Ku tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak binaan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB) Sidoarjo, tetapi juga dibuka untuk masyarakat umum kurang mampu yang membutuhkan terapi.

"Operasional setiap hari memang untuk anak-anak dalam UPT. Tapi setiap hari Rabu dibuka untuk masyarakat umum, gratis," kata Restu Novi Widiana. (dik/vga)

Belanja Pegawai Baru 29 Persen, Bupati Pastikan Tak Ada PHK PPPK

KOTA-Kabar soal pembebasan perolehan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat memunculkan kekhawatiran di kalangan pegawai non-ASN. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan kondisi fiskal daerah masih aman dan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PPPK.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pora belian pegawai dalam APBD Kabupaten Sidoarjo saat ini masih berada di angka 29 persen. Angka tersebut masih di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut Subandi, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemkab Sidoarjo masih sangat terkendali di bidang keuangan sejumlah daerah lain yang belanja pegawai-

nya sudah melampaui batas.

"Karena kenapa ini aman, kita jamin? Sidoarjo itu terkait regulasinya masih 29 persen. Kalau daerah lain ada yang 40 persen, 35 persen, aman Sidoarjo," ujar Subandi, Rabu (20/5).

Ia memastikan, para PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu



Bupati Sidoarjo Subandi.



Wabup Mimik Idayana berpose bersama pengurus KORMI Sidoarjo usai pertelangan, Rabu (20/5).

Komitmen Tambah Kamping Olahraga Masyarakat

Pengurus KORMI Sidoarjo 2025-2029 Resmi Dilantik

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak 70 pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KOMI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 resmi dilantik oleh Ketua KORMI Jawa Timur Saiful Huda di Gedung Olahraga (GOR) Sidiyasa, Rabu (20/5).

Ketua Umum KORMI Sidoarjo MG Hadi Sunjoto menyatakan, kepemimpinan baru diharapkan dapat melanjutkan berbagai program pembebasan olahraga masyarakat, termasuk pengembangan olahraga tradisional dan pembebasan Kam-



Wabup Mimik Idayana berpose bersama pengurus KORMI Sidoarjo usai pertelangan, Rabu (20/5).

panya 255 Kamping Olahraga Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan. KORMI juga terus mendorong pelaksanaan olahraga tradisional dan permainan rakyat sebagai sarana edukasi sekaligus melatih strategi berpikir anak-anak, diantaranya melalui permainan dadak dan catur. (Starva)

Wabup: Kedaulatan Bangsa Kini Ditentukan di Ruang Digital

Harkitas 2026

KOTA-Suamang kabangkita digital yang kian berkembang ini sebagai peluang yang melampaui batas. Di era digital ini, tantangan bangsa telah bergeser pada upaya menjaga kedaulatan bangsa di ruang digital. Generasi muda dari ancaman ruang digital yang tak terduga.

Peserta dan diwakili Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana saat menghadiri upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (20/5). Upacara tersebut dikuti TMI, FPI, ASN, organisasi masyarakat, mahasiswa, siswa hingga pelajar.

Dalam kesempatan itu, Mimik Idayana mengucapkan Menteri Komunikasi dan Digital RI sebagai kebanggaan dan penghargaan yang tinggi. "Tunas bangsa" di tengah derasnya arus transformasi digital.

"Saya harap, berdirinya Swasti Indonesia sebagai generasi muda yang unggul secara intelektual dan diplomatik. Hari ini, tantangan kita telah bergeser menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital," ujar Mimik.



DIGITALISASI: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat memimpin upacara Harkitnas 2026 di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (20/5).

Flyover Gedangan Digeser ke Sisi Timur, Banyak Ases Milik Negara

RAMAI: Perempatan Gedangan Sidoarjo jadi langganan kemacetan kendaraan setiap harinya.

GEDANGAN - Pemerintah memutuskan proses pembebasan lahan rencana pembangunan Flyover Gedangan ke sisi timur, banyak ases milik negara.

ver direncanakan berada di tengah dengan bentang ke sisi kiri dan kanan jalan.

Namun setelah melalui berbagai kajian teknis dan pertimbangan sosial-ekonomi, desain diubah menjadi berada di sisi timur saja.

"Jadi gini, kami memang bagaimana mengidentifikasi dan mitigasi risiko macam-macam itu. Yang pertama kenapa molor, karena kemarin harus mengubak DED dari tengah sisi timur," ujar Makhdum, Rabu (20/5).

Menurut Makhdum, proses perubahan desain ini membutuhkan waktu karena pengerjaannya bukan dilakukan pemerintah daerah, melainkan BPPN pusat. Setelah revisi DED selesai sekitar satu bulan lalu, kini tahapan berikutnya adalah penyusunan Dinding Penahan Tanah (DPT).

Tu butuh waktu karena yang mengganti DED ini bukan di kita, tapi BPPN pusat. Setelah DED selesai,



RAMAI: Perempatan Gedangan Sidoarjo jadi langganan kemacetan kendaraan setiap harinya.

Wabup Mimik Idayana berpose bersama pengurus KORMI Sidoarjo usai pertelangan, Rabu (20/5).

Wabup Mimik Idayana berpose bersama pengurus KORMI Sidoarjo usai pertelangan, Rabu (20/5).

Angka Permintaan Cerai Tembus 2.640 Kasus

60% dari total kasus

60% dari total kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus perceraian di Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka dalam menghadapi masalah pernikahan.

Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum dan konseling pernikahan.

Pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan layanan dukungan bagi pasangan yang mengalami masalah pernikahan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka dalam menghadapi masalah pernikahan.

Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum dan konseling pernikahan.

Pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan layanan dukungan bagi pasangan yang mengalami masalah pernikahan.

Tambak Cemandi Terendam Banjir Rob

Warga Desa Jalan Ditenggelamkan dan Tanggapi Diperkuat

SEBANYAK 200 hektar tambak cemandi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, terendam banjir rob.

Walaupun pasang surut air pasang, banjir rob yang datang dengan tiba-tiba telah merendam sebagian besar lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Warga setempat meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan pembenahan tanggul dan saluran air di kawasan tersebut.



Walaupun pasang surut air pasang, banjir rob yang datang dengan tiba-tiba telah merendam sebagian besar lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Warga setempat meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan pembenahan tanggul dan saluran air di kawasan tersebut.

Walaupun pasang surut air pasang, banjir rob yang datang dengan tiba-tiba telah merendam sebagian besar lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Warga setempat meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan pembenahan tanggul dan saluran air di kawasan tersebut.

Walaupun pasang surut air pasang, banjir rob yang datang dengan tiba-tiba telah merendam sebagian besar lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Warga setempat meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan pembenahan tanggul dan saluran air di kawasan tersebut.

Walaupun pasang surut air pasang, banjir rob yang datang dengan tiba-tiba telah merendam sebagian besar lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar.

Warga setempat meminta pemerintah setempat untuk segera melakukan pembenahan tanggul dan saluran air di kawasan tersebut.

Belanja Pegawai Baru 29 Persen, Bupati Pastikan Tak Ada PHK PPPK

KOTA-Kabar soal pembatasan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat memunculkan kekhawatiran di kalangan pegawai non-ASN. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan kondisi fiskal daerah masih aman dan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PPPK.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, porsi belanja pegawai dalam APBD Ka-

bupaten Sidoarjo saat ini masih berada di angka 29 persen. Angka tersebut masih di bawah batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut Subandi, kondisi itu membuat ruang fiskal Pemkab Sidoarjo masih sangat terkendali dibandingkan sejumlah daerah lain yang belanja pegawai-

nya sudah melampaui batas.

"Karena kenapa ini aman kita jamin? Sidoarjo itu terkait regulasinya masih 29 persen. Kalau daerah lain ada yang 40 persen, 35 persen, aman Sidoarjo," ujar Subandi, Rabu (20/5).

Ia memastikan, para PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu

● Ke Halaman 10



Bupati Sidoarjo Subandi.



Belanja Pegawai Baru...

tidak perlu khawatir terkait isu PHK. Pemkab Sidoarjo, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pegawai yang telah lama mengabdikan. "Yang penting kita sebagai pimpinan daerah, teman-teman PPPK,

penuh waktu maupun paruh waktu, tidak ada terutama untuk PHK," tegasnya.

Subandi mengaku tidak ingin melihat pegawai yang sudah mengabdikan hingga puluhan tahun justru kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.

"Sudah sekian tahun semua. Ini tanggung jawabnya bupati. Bekerja sudah

20 tahun, 15 tahun, kok diberhentikan. Ini saya rasa gak boleh," katanya.

Ia juga menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan perekrutan PPPK. Namun, untuk pegawai yang saat ini sudah ada, keberlangsungannya

dipastikan aman.

"Kalau kita, PPPK kita sudah selesai ya. Kita tidak mau intervensi kepada pemerintah pusat," imbuhnya.

Selain itu, Subandi menyebut setiap tahun sekitar 600 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo memasuki masa pensiun. Kon-

disi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat posisi PPPK dalam pelayanan pemerintahan daerah.

"Apapun yang terjadi di pimpinan daerah, ini kita harus punya tanggung jawab kepada ASN, non-ASN kita. Insyaallah aman," tandasnya. (dik/vga)





DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

RAMAI: Perempatan Gedangan Sidoarjo jadi langganan kemacetan kendaraan setiap harinya.

Flyover Gedangan Digeser ke Sisi Timur, Banyak Aset Milik Negara

GEDANGAN-Pemerintah memutuskan menggeser konstruksi Flyover Gedangan Sidoarjo ke sisi timur jalan. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Selain untuk menjaga denyut perekonomian warga di sisi barat tetap hidup, perubahan desain juga dinilai mampu mempercepat proses pembebasan lahan karena mayoritas aset berada di bawah penguasaan negara.

Di balik perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) harus melakukan serangkaian mitigasi risiko yang memakan waktu cukup panjang.

Bahkan, perubahan Detail Engineering Design (DED) harus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) pusat.

Kepala DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud menjelaskan, awalnya desain flyo-

ver direncanakan berada di tengah dengan bentang ke sisi kiri dan kanan jalan.

Namun setelah melalui berbagai kajian teknis dan pertimbangan sosial-ekonomi, desain diubah menjadi berada di sisi timur saja.

“Jadi gini, kami memang bagaimana mengidentifikasi dan mitigasi risiko macam-macam itu. Yang pertama kenapa molor, karena kemarin harus mengubah DED dari tengah kiri-kanan menjadi sisi timur,” ujar Makhmud, Rabu (20/5).

Menurut Makhmud, proses perubahan desain membutuhkan waktu karena pengerjaannya bukan dilakukan pemerintah daerah, melainkan BBPJN pusat. Setelah revisi DED selesai sekitar satu bulan lalu, kini tahapan berikutnya adalah penyesuaian Dinding Penahan Tanah (DPT).

“Itu butuh waktu karena yang mengganti DED ini bukan di kita, tapi BBPJN pusat. Setelah DED selesai,

● Ke Halaman 10

Flyover Gedangan Digeser...

sekarang proses mengubah DPT," katanya.

Perubahan desain ke sisi timur juga didasarkan pada hasil review geomet-

rik dan kajian teknis. Sisi timur dinilai memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk menopang struktur bawah jembatan flyover.

Tak hanya faktor teknis, pertimban-

gan ekonomi juga menjadi alasan utama. Pemkab ingin aktivitas ekonomi masyarakat di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap berjalan selama proyek berlangsung.

"Supaya nggak mati perekono-

mian di situ. Kalau semua kena, nanti ekonomi nggak jalan dan repot," jelasnya.

Selain itu, kawasan sisi timur diketahui dipenuhi aset milik pemerintah dan negara. Di antaranya lahan milik PT KAI, kantor kecamatan lama, puskesmas, polsek hingga sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.

Kondisi tersebut dinilai akan mempermudah proses pengadaan lahan dibanding harus membebaskan banyak lahan milik warga.

"Karena di sini banyak aset negara. Contohnya punya KAI, punya kecamatan, kelurahan, polsek dan lainnya. Jadi nanti lebih banyak memakai lahan negara," ungkap Makhmud.

Dengan skema tersebut, Pemkab

Sidoarjo optimistis proses pengadaan tanah bisa selesai lebih cepat.

DPUBMSDA menargetkan pembebasan lahan Flyover Gedangan rampung pada akhir November 2026 agar pembangunan fisik dapat dimulai pada 2027 mendatang.

"Kalau ditarget timeline kami sampai akhir November. Pokoknya tahun ini harus clear," tegasnya.

Meski waktu yang tersisa relatif singkat, yakni sekitar enam bulan, pihaknya tetap yakin target tersebut dapat tercapai. Saat ini proses identifikasi dan inventarisasi lahan terdampak masih terus dilakukan.

"Kalau saya target kami mampu, karena kami butuh optimistis," tandasnya. (dik/vga)

Mantan Kades...

"Perkaranya sudah selesai disidangkan di tingkat pertama dan sekarang sedang dalam proses banding," jelasnya.

Atas meninggalnya terdakwa, Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan segera menyampaikan informasi tersebut kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai bagian dari proses administrasi hukum.

"Kami akan menyampaikan kepada majelis hakim banding bahwa terdakwa telah meninggal dunia. Biasanya nanti majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan," pungkasnya.

Diketahui, Sukriwanto tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pemerintah Desa Ental-

sewu Tahun Anggaran 2022. Nilai dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 3,6 miliar.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Sukriwanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidi-der dua bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan. (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FENOMENA

Tambak Cemandi Terendam Banjir Rob

Warga Desak Jalan Ditinggikan dan Tanggul Diperkuat

SEDATI-Warga pesisir di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo,

resah. Tak hanya ratusan tambak yang jebol diterjang banjir rob, sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) juga harus hidup berdampingan dengan genangan air laut yang masuk hingga ke pemukiman warga, Rabu (20/5).

Wilayah paling terdampak berada di RT 1 hingga RT 4 Dusun Gisik Kidul. Banjir rob yang datang hampir setiap tahun itu disebut semakin parah sejak 2018 dan hingga kini belum menemukan

● Ke Halaman 10

TERGENANG: Rumah warga di Tambak Cemandi, Sedati, Sidoarjo, terdampak banjir rob.



Tambak Cemandi...

solusi penenangan yang benar-benar efektif. Ketua LPMD Desa Tambak Cemandi Tohir mengatakan, ratusan rumah warga terdampak akibat luapan air laut yang masuk ke kawasan permukiman.

"Insyaallah ada 300 KK yang terdampak. Itu di wilayah Gisik Kidul, mulai RT 1 sampai RT 4," ujarnya.

Menurut Tohir, kondisi banjir rob ta-

hun ini kembali membuat warga kesulitan beraktivitas. Meski akses jalan kampung masih bisa dilalui kendaraan, warga membatasi orang luar masuk demi keselamatan.

Ia menjelaskan, banjir rob di kawasan tersebut terjadi rutin setiap tahun, terutama saat puncak pasang laut pada Mei dan Juni. Sedangkan pada November dan Desember, banjir juga masih terjadi meski lebih sering datang pada malam hari.

"Setiap bulan lima sama enam itu puncaknya banjir rob. Dalam satu tahun bisa empat kali banjir, Mei, Juni, November, dan Desember," katanya.

Tohir menuturkan, genangan terjadi akibat pasang air laut setinggi tiga hingga empat meter yang membuat air meluap ke daratan sekaligus menghambat aliran air menuju laut.

Banjir rob mulai naik sejak Sabtu (16/5) sekitar pukul 09.00. Ketinggian air rata-rata mencapai 15 hingga 20

sentimeter. Bahkan, di sejumlah titik genangan mencapai setinggi lutut orang dewasa.

Karena itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera turun tangan memberikan solusi konkret untuk menyelamatkan kawasan pesisir tersebut. Salah satu usulan utama warga adalah peninggian akses jalan kampung dan penguatan tanggul penahan air laut.

"Harapan kami warga Gisik Kidul

mohon dibantu masalah jalan, coba ditinggikan. Barangkali itu bisa menanggulangi banjir," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan warga RT 03/RW 01 Dusun Gisik Kidul, Mulyadi. Ia mengatakan banjir rob sangat merugikan petani tambak karena hasil budidaya banyak yang rusak hingga hanyut terbawa arus laut.

"Sangat merugikan petani tambak. Banyak hasil tambak rusak dan hanyut," katanya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Angka Permintaan Cerai Tembus 2.640 Kasus

KOTA-Alami rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo tengah berbunyi keras. Sepanjang Januari hingga April 2026, angka perceraian di Sidoarjo sudah menembus 2.640 perkara. Jumlah ini diprediksi masih terus bertambah hingga akhir tahun.

Data mengejutkan itu diungkapkan Panitera Muda (Pan-

terjemahan: mud) Pengadilan Agama Sidoarjo, Dr. Bayu Endragupta. Menurutnya, ribuan perkara perceraian tersebut telah tercatat resmi masuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kurun empat bulan pertama 2026.

"Perkara masuk perceraian sampai dengan bulan April tahun 2026 tercatat sudah 2.640 perkara masuk," ujar Bayu.

Dari total perkara tersebut, sebanyak 1.036 perkara telah diputus majelis hakim. Mirisnya, mayoritas perkara yang selesai diputus didominasi pertengkaran yang terjadi terus menerus. "Yang sudah selesai atau diputus sebanyak 1.036 perkara. Dari jumlah itu, 1.021 perkara disebabkan pertengkaran," katanya.

Bayu menjelaskan, persoalan ekonomi masih menjadi pemicu utama retaknya rumah tangga di Sidoarjo.

Tekanan kebutuhan hidup, penghasilan yang tidak stabil, hingga persoalan nafkah kerap memicu konflik berkepanjangan antara pasangan suami istri. "Hal itu biasanya disebabkan karena faktor eko-

nomi," jelasnya.

Ia menambahkan, angka perceraian di Sidoarjo tahun 2026 masih sangat mungkin bertambah signifikan. Sebab, saat ini baru memasuki pertengahan tahun, sementara tren pengajuan gugatan perceraian masih terus berjalan.

"Potensi penambahan perkara masih sangat besar karena

tahun ini belum berakhir," pungkas Bayu.

Tingginya angka perceraian di Sidoarjo ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Selain faktor ekonomi, edukasi tentang ketahanan keluarga dinilai penting untuk menekan lonjakan kasus perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. (sur/vga)





DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

JIWA SOSIAL: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua dari kiri) saat menggendong balita di UPT PPSAB Sidoarjo, Selasa (19/5) sore.

Omah Therapi-Ku di UPT PPSAB Resmi Dibuka untuk ABK dan PMKS

■ Warga Kurang Mampu Bisa Terapi Gratis

KOTA-Harapan baru bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hingga masyarakat kurang mampu kini hadir di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka layanan Omah Therapi-Ku di Jalan Monginsidi, Kelurahan Sidoklumpuk, yang menyediakan terapi gratis bagi warga kurang mampu setiap hari Rabu.

Layanan yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu menjadi salah satu

upaya memperluas akses terapi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendampingan tumbuh kembang maupun rehabilitasi.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur (Kadinsos Jatim) Restu Novi Widiani mengatakan, Omah Therapi-Ku tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak binaan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB) Sidoarjo, tetapi juga dibuka untuk masyarakat umum kurang mampu yang membutuhkan terapi.

“Operasional setiap hari memang untuk anak-anak dalam UPT. Tapi setiap hari Rabu dibuka untuk masyarakat umum, gratis,” kata Restu Novi Widiani. (dik/vga)

Wabup: Kedaulatan Bangsa Kini Ditentukan di Ruang Digital

Harkitnas 2026

KOTA-Semangat kebangkitan nasional tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik melawan penjajah. Di era digital saat ini, tantangan bangsa telah bergeser pada upaya menjaga kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda dari ancaman ruang digital yang tak sehat.

Pesan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana saat memimpin Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (20/5). Upacara tersebut diikuti TNI, Polri, ASN, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga pelajar.

Dalam kesempatan itu, Mimik membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI sekaligus menegaskan pentingnya menjaga "tunas bangsa" di tengah derasnya arus transformasi digital.

"Sejarah mencatat, berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908 menjadi tonggak perubahan perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik. Hari ini, tantangan kita telah bergeser menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital," ujar Mimik.



DIGITALISASI: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana saat memimpin upacara Harkitnas 2026 di Alun-alun Sidoarjo, Rabu (20/5).

Tema Harkitnas tahun ini, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", menurutnya menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan kualitas generasi mudanya.

Ia menyoroti langkah pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital melalui pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

"Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan ruang

digital yang sehat, aman, dan sesuai usia tumbuh kembangnya," katanya.

Selain perlindungan digital, Mimik juga memaparkan sejumlah program strategis nasional yang disebut menjadi bagian dari visi besar membangun kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (dik/vga)



Flyover Gedangan Mulai Digarap 2027

Pembebasan Lahan Ditarget Rampung Akhir 2026

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo menyosialisasikan rencana pengadaan tanah pembangunan Flyover Gedangan yang dihadiri ratusan warga terdampak di Kantor Kecamatan Gedangan.

Dalam agenda tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan selesai pada akhir 2026. Sementara pembangunan flyover direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Kepala Dinas PUBMSDA, Kepala Dinas Perkim CKTR, camat, serta kepala desa. Turut hadir perwakilan BPN, Kejaksaan

Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, dan instansi terkait lainnya.

Subandi menegaskan pembangunan Flyover Gedangan merupakan program prioritas untuk kepentingan masyarakat luas sekaligus bagian dari visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Sidoarjo. Program tersebut juga telah mendapat dukungan dari



Sosialisasi pengadaan tanah Flyover Gedangan dihadiri ratusan warga terdampak proyek pembangunan.

pemerintah pusat.

Ia memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dalam proses pembebasan lahan. Seluruh aset berupa tanah, bangunan, maupun tanaman akan di-

ganti sesuai nilai appraisal tertinggi.

"Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa

makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan. Kalau Bapak/Ibu membantu, kami juga akan membantu penjenangan semua," tegas Subandi, Senin (18/5) malam.

Selama sosialisasi berlangsung, tidak ada penolakan dari warga terhadap rencana pembangunan flyover tersebut. Warga justru terlihat antusias dan aktif mengajukan berbagai pertanyaan.

Beberapa hal yang ditanyakan antara lain terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, M Makhmud, memaparkan tahapan pengadaan tanah yang meliputi perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan.

Menurutnya, tahapan pelaksanaan mencakup pengukuran lahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, penilaian oleh appraisal independen, hingga pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Pembangunan Flyover Gedangan ditujukan untuk mengatasi kemacetan di perempatan Gedangan yang telah berlangsung lama. Selain itu, proyek tersebut diharapkan memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Makhmud menjelaskan

berdasarkan kajian teknis Detail Engineering Design (DED), trase proyek digeser ke sisi timur karena dinilai lebih efisien dan minim dampak sosial.

"Ada penghematan waktu, efisiensi anggaran, dan pengurangan dampak sosial ke sisi timur merupakan pertimbangan teknis DED Flyover Gedangan. Hasil geometrik BBPN menunjukkan sisi timur memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk struktur bawah jembatan," jelasnya.

Ia menambahkan luas lahan terdampak mencapai 45.822 meter persegi dengan total 89 kepala keluarga terdampak. Selain itu, lebih banyak lahan yang berstatus milik negara seperti Polsek,

Puskesmas, PDAM, dan lahan milik PT KA.

Sementara itu, Subandi memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB dalam proses pembebasan lahan.

Ia mengimbau masyarakat segera menyiapkan dokumen kepemilikan lahan, mulai alas hak, data bangunan, hingga tanaman yang berada di atas tanah tersebut. Warga juga diminta aktif berkoordinasi dengan kepala desa dan camat agar proses administrasi berjalan lancar.

Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi, proyek Flyover Gedangan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. (jok/fer)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komitmen Tambah Kampung Olahraga Masyarakat

Pengurus KORMI
Sidoarjo 2025-2029
Resmi Dilantik



Wabup Mimik Idayana berpose bersama pengurus KORMI Sidoarjo usai pelantikan, Rabu (20/5). foto istimewa

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak 70 pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029 resmi dilantik oleh Ketua KORMI Jatim Debie Sisilia Samoa di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (20/5).

Ketua Umum KORMI Sidoarjo MG Hadi Sutjipto menyatakan, kepengurusan baru diharapkan dapat melanjutkan berbagai program pembinaan olahraga masyarakat, termasuk pengembangan olahraga tradisional dan pembentukan Kam-

pung Olahraga Masyarakat.

Kata dia, fokus utama KORMI adalah mengajak masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia untuk gemar berolahraga demi mewujudkan Indonesia sehat dan bugar menuju Indonesia Emas 2045. "Di KORMI terdapat 69 induk organisasi olahraga masyarakat dan komunitas olahraga," cetusnya.

Selain tujuan kesehatan, KORMI juga mengutamakan prestasi melalui Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat provinsi maupun nasional. Pihaknya juga bakal memperluas keberadaan Kampung Olahraga Masyarakat hingga berbasis desa dan kelurahan, melibatkan RT dan RW.

Hingga kini, KORMI Sidoarjo telah

membentuk 255 Kampung Olahraga Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan. KORMI juga terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dan permainan rakyat sebagai sarana edukasi sekaligus melatih strategi berpikir anak-anak, diantaranya melalui permainan dadak dan catur. (sta/rus)

HARIAN
BANGSA

Koran Wargo, Jatim

Marfen Dapat Apresiasi dari Wabup Mimik Idayana

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana mengunjungi Muhammad Marfen, siswa kelas V MI Darussalam Sugihwaras Kecamatan Candi, Senin (18/5). Marfen kini menjadi perhatian publik setelah suratnya dibaca langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Surat yang ditulis Marfen ini

berisi ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirasakannya langsung di sekolahnya. Surat tersebut diterima Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5) lalu.

Kunjungan Wabup Mimik itu bentuk apresiasi atas keberanian dan kepedulian seorang anak



Wabup Mimik Idayana mengunjungi Muhammad Marfen, siswa kelas V MI Darussalam Sugihwaras, Senin (18/5). foto diskomininfo

menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden RI. Kisah Marfen juga menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya berani berpendapat secara santun dan positif.

Kata Wabup Mimik, keberanian Muhammad Marfen patut diapresiasi karena mampu menunjukkan sikap percaya diri sekaligus kepedulian terhadap program pemerintah. "Tentu kami bangga

karena dari Kabupaten Sidoarjo ada anak yang memiliki keberanian, kepedulian dan semangat seperti ini," cetusnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat. Sebab, program tersebut sangat membantu pemenuhan gizi anak-anak sekaligus mendukung kualitas pendidikan. (sta/rus)

HARIAN
BANGSA

Koran Wargo, Jatim